

# LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Benny K. Harman dan Antonius Sudirman

Ketua Komisi III DPR RI & Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.

## Abstract

*This writing speaks of strategic steps in eradicating the corruption in Indonesia. The out come of the discussions shows that there is a need for strategic steps to eradicate the corruption in Indonesia; they are as follow: (1) There is the social movement to do it; (2) Political networking to strengthen the anti-corruption movements; (3) The commitment of the political party to eradicate the corruption; (4) To reform the anti-corruption law so that criminal sanctions are to prevent a person committing corruption; (5) Team working of law enforcer to investigate and prosecute for corruption; (6) People's supervision toward the apparatuses; (7) To increase the public service and to implement of good governance and clean government.*

**Kata Kunci:** Langkah-langkah Strategis Dan Memberantas Korupsi.

Sejak beberapa dasa warsa terakhir korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) berkembang dengan pesat di Indonesia. Korupsi telah terjadi pada hampir setiap instansi baik instansi pemerintahan maupun swasta. Lebih memprihatinkan pelaku korupsi adalah pejabat penegak hukum dan keadilan, mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai pada Mahkamah Agung RI dan tingkat kejaksaan negeri sampai pada Kejaksaan Agung RI, serta pada instansi kepolisian negara RI. Contoh kasus yakni dugaan korupsi dalam kasus Bank Century yang berbuntut pada pembentukan Pansus DPR dan kasus penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh Gayus HP Tambunan dan para kroninya dengan melibatkan aparaturnya penegak hukum.

Tampaknya para koruptor tidak memiliki hati nurani, rasa malu dan perasaan bersalah melakukan korupsi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu muncul istilah baru, "korupsi sebagai budaya baru di Indonesia" Dikatakan demikian karena praktik korupsi sudah begitu mengakar dalam diri seseorang, seolah-olah hal itu merupakan kebiasaan yang baik yang perlu dipertahankan dan karena itu sulit diubahkembali.<sup>1</sup> Istilah dalam bahasa Bugis, "*Liele bulu' tellele abiasang*" (gunung dapat berpindah tetapi kebiasaan tidak, kata lain mengubah kebiasaan lebih sulit

daripada memindahkan sebuah gunung).<sup>2</sup>

Apabila korupsi di Indonesia tidak segera diatasi maka korupsi akan menjadi penyakit "kanker ganas" yang "bermetastase" ke mana-mana, baik pada instansi swasta maupun dalam tubuh kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif mulai dari pusat hingga daerah. Dan pada gilirannya akan menjadi faktor potensial merusak moralitas anak bangsa, tatanan demokrasi, mengancam keutuhan dan kelangsungan eksistensi NKRI serta terhambatnya perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Itulah sebabnya penulis tertarik membahas masalah korupsi dengan topik bahasan, Beberapa Langkah Strategis untuk Memberantas Korupsi di Indonesia. Permasalahan yang dianalisis yakni, Bagaimakah faktor penyebab korupsi dan langkah-langkah strategis memberantas korupsi?

## Perkembangan Korupsi Zaman Orde Baru

Korupsi besar-besaran pada zaman orde baru di bawah Soeharto, dikuras dari tiga sumber dana: utang luar negeri, modal asing, serta "uang minyak" (*petrodollar*) dan penerimaan negara lainnya. Bukan rahasia lagi jika perusahaan negara telah menjadi "sapi perahan" seperti Pertamina dan perusahaan tambang milik negara, Bulog, PLN, Telkom dan bank-bank negara. Penyelewengan dalam Pertamina

1 Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. UNDIP Press, Semarang, 2009. hlm. 136-137.

2. Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Kasus Hakim Bismar Siregar, hlm. 4.

mencapai puncaknya ketika perusahaan ini dililit utang komersial yang mengguncangkan sebesar 10,4 miliar dollar AS pada 1975, sehingga Mayjen (Purn) Ibnu Sutowo dipaksa mundur dari Direktur Utama.<sup>3</sup>

Penyelewengan berbagai sumber keuangan negara di bawah Soeharto akhirnya menggulirkan gelombang krisis moneter yang tak terbendung lagi sejak paruh akhir 1997. Skandal keuangan terbesar dalam sejarah bisnis di Indonesia pun terbongkar dalam apa yang disebut sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 144,5 triliun. Skandal ini diduga juga merugikan negara lebih dari Rp 600 triliun.

Jika dibandingkan dengan mereka yang pernah menjadi penguasa korup dan diktator lainnya, Soeharto dan keluarganya jauh lebih unggul dalam angka. Soeharto mengalahkan Marcos (Filipina), Shah Iran, Idi Amin Dada (Uganda), Mobutu Sese Seko (Zaire), Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), dan Augusto Pinochet.<sup>4</sup> Dugaan begitu besar korupsinya sehingga dapat memperpanjang periode kekuasaan Soeharto dengan dukungan bisnis, militer dan birokratis.

Relasi penguasa (patron) dengan pengusaha (klien), belakangan disebut kroni-kroninya, bukan saja membangun "kerajaan bisnis" yang berwatak kolusif dan nepotis, juga didukung oleh watak politik otoriter. Dengan konstruksi bisnis dan politik berikut ini menandai warisannya dan berdampak pada kesulitan pasca-Soeharto dalam memberantas korupsi. *Pertama*, aliran modal asing dalam sektor pertambangan seperti minyak dan gas bumi (migas), emas dan tembaga, nikel dan timah sejak akhir 1960-an, telah menghadirkan pendapatan negara berupa bagi hasil dan pajak yang meningkatkan kemampuan negara dalam menggerakkan perekonomian. Tetapi pendapatan ini lebih diarahkan untuk kepentingan bisnis atau ekonomi di sekitar Soeharto dan kroni-kroninya. Pada 1970, mulai muncul tuduhan korupsi, juga kritik Bung Hatta dan pembentukan Komite Empat (antikorupsi), serta setahun berikutnya lahir UU No. 3 Tahun 1971.

*Kedua*, dengan "uang minyak" yang melimpah, bersumber dari pendapatan ekspor migas dan pajaknya, Orde Baru membangun model program Industri Substitusi Impor (ISI). Tetapi model ini adalah sumber proteksi dan subsidi yang mengakibatkan harga produk (otomotif, baja, elektronik, ban, petrokimia) menjadi sangat mahal dengan sistem monopoli pasar, ttaapi sekaligus sebagai sumber korupsi dan kolusi pembagian saham, lisensi, kontrak dan proyek, pemberian kredit dan penggelembungan (*mark-up*). Cara dan praktik ini cukup menguras berbagai sumber migas serta "uang minyak" sebagai devisa terbesar negara pada 1970-an.

*Ketiga*, relasi penguasa-pengusaha itu menjalar dalam kebijakan konsesi hutan. Hutan sebagai salah satu kekayaan alam ikut juga dijadikan ladang bisnis yang menggiurkan berupa kayu glondongan dan kayu lapis yang diekspor sebagai devisa "emas hijau". Sampai sekarang, tetap banyak hutan tropis yang mengalami penggundulan dan kerusakan di tiga pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.<sup>5</sup>

*Keempat*, proyek ISI membutuhkan kesiapan pasar domestik yakni lapisan konsumen. Kebutuhan lapisan "orang kaya baru" (OKB) adalah konsekuensi dari produk industri hanya untuk pasar domestik. Tampaknya pembentukan OKB ini berlangsung dalam berbagai macam penyelewengan dana APBN khususnya anggaran rutin dan bentuk penerimaan negara lainnya.<sup>6</sup> Sumitro Djojohadikusumo dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomui Indonesia (ISEI) di Surabaya, November 1993 menegaskan soal kebocoran dana pembangunan sekitar 30 persen.<sup>7</sup>

*Kelima*, pajak dan bea cukai (BC) menjadi "lahan basah" praktik korupsi<sup>8</sup> Banyak perusahaan yang tumbuh dan membesar adalah pembayar pajak yang penting. Tetapi tak sedikit dari mereka menggelapkan pajak dan para petugas pun menikmati suap atau melakukan pemerasan.<sup>9</sup> Sementara, arus barang dari luar negeri (impor) dan ekspor wajib membayar bea masuk atau keluar. Sehingga ada yang menilai BC sebagai institusi yang bobrok.<sup>10</sup> Dugaan korupsi

3. Ibid.

4. Lihat Hendardi, "Timbunan Korupsi Republik," *Kompas*, Senin, 23 Agustus 2010.

5. Lihat "Soeharto Inc: How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune," *Time*, 24 May 1999. (dicut)

6. Lihat "Kerusakan Hutan di Indonesia Terparah Kedua di Dunia", *www.detiknews.com*, Selasa, 27 April 2010 17:24 WIB. Laju kerusakan hutan mencapai 1,87 juta hektar dalam kurun 2000-2005, mengakibatkan Indonesia peringkat 2 dari 10 negara dengan kerusakan tertinggi di dunia. Lihat juga, "60,9 Juta Hektar Hutan dan DAS Rusak," *TEMPO Interaktif*, Senin, 26 Juni 2006 | 15:25 WIB.

7. Lihat Richard Robison, "Power and Economy in Soeharto's Indonesia," *Journal of Contemporary Asia*, 1990; dan Richard Robison dan David SG Goodman, (eds), *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonalds and Middle Class Revolution*, London: Routledge, 1996.

8. Lihat "Menghitung Kebocoran," *Tempo*, 22 Januari 1994.

9. (footnote urut nomor 1 s.d terakhir, tidak ada perbedaan referensi buku, majalah, internet/sumber lainnya)

BC masih terus berlangsung hingga kini sebagaimana yang terjadi di Tanjungpriok.<sup>11</sup>

*Keenam*, seiring kemajuan ekonomi pada dasawarsa 1980-an, praktik korupsi terus meluas. Para pelaksana birokrasi, terutama yang berkaitan dengan segala bentuk perizinan bisnis sejak diluncurkannya kebijakan IOE, terbentuk semacam "birokrasi pungutan" dan menjadi bagian dari "ekonomi biaya tinggi".<sup>12</sup> Petugas administrasi dan birokrasi memungut uang dari perusahaan (pungutan liar) baik atas nama perizinan maupun nama lainnya seperti keamanan.<sup>13</sup> Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 yang disampaikan kepada DPR, tercatat bahwa pungutan dari 13 instansi pemerintah senilai Rp 186,47 miliar tidak ada dasar hukumnya.<sup>14</sup> Pemerintah Orde Baru juga membentuk sejumlah organisasi korporatis yang menambah kerumitan sosial-politik.<sup>15</sup>

*Ketujuh*, banyak perusahaan negara atau pemerintah seperti Pertamina dan Bulog telah menjadi semacam "sapi perahan" dalam praktik korupsi di masa Orde Baru. Sampai kini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih tetap langgeng dengan korupsi.<sup>16</sup> Kejaksaan Agung mengumumkan dugaannya atas korupsi yang terjadi di salah satu BUMN yang merugikan negara sekitar 37 juta dollar AS<sup>17</sup> seperti yang terungkap mengenai indikasi korupsi sekitar Rp 10,484 triliun di sejumlah BUMN selama 2004-2006 atas 57 kasus yang ditemukan dengan kerugian terbesar ada di sektor perbankan dan asuransi yang bernilai sekitar Rp 5,3 triliun, dan sektor energi dan listrik menempati urutan kedua sekitar Rp 3 triliun.<sup>18</sup>

Persoalan pokok korupsi dan kolusi di bawah Orde Baru tak hanya memapankan patronase bisnis

yang menyatukan kepentingan bisnis, politik dan birokratik, tetapi juga menggerogoti anggaran pembangunan serta birokrasi yang memperluas kepentingannya dengan pembentukan "birokrasi pungutan". Selain itu, BUMN tetap menjadi "sapi perahan" dalam praktik korupsi yang diwarisi hingga kini. Tak lupa juga penting diperhatikan mengenai warisan dan perluasan jaringan mafia peradilan yang menambah rumitnya persoalan korupsi di Indonesia.

### Perkembangan Tingkat Korupsi Pasca Orde Baru

Apa yang diwariskan Orde Baru, masih terus berlangsung. Memang krisis moneter yang diwariskan telah menimbulkan rangkaian kesulitan ekonomi yang sangat dirasakan banyak penduduk, tetapi kondisi politik memang berubah dan kebebasan lebih dinikmati yang menandai proses demokratisasi berjalan.<sup>19</sup> Seiring dengan itu, tumbuh format politik yang dimainkan oleh partai-partai, pemilihan umum (pemilu) dan parlemen.<sup>20</sup>

Reformasi yang telah berjalan lebih 10 tahun, dianggap Presiden SBY sebagai revolusi diam-diam (*the quiet revolution*), suatu transisi demokrasi, yang mengubah peta politik, tetapi tanpa menimbulkan guncangan sosial yang serius. Telah berlangsung tiga kali pemilu, terjadi transformasi TNI dari politik menuju profesionalisme, dinikmati kebebasan pers, otonomi daerah telah berkembang dan digelar ratusan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) secara langsung.<sup>21</sup>

Memang demokratisasi telah berlangsung lebih satu dasawarsa, tetapi disayangkan bahwa korupsi terus saja berkembang dan menimbulkan kekhawatiran pakar ekonomi tentang dampaknya terhadap investasi dan pengembangan industri dalam jangka panjang. Ketua sementara Komisi

8. Lihat "Presiden kecewa dengan Ditjen Pajak dan Bea Cukai," *www.yustisi.com*, Rabu, 21 Juli 2010 pukul 18:40.

9. Lihat "Modus-Modus Baru Penggelapan Pajak," *www.vivanews.com*, Rabu, 31 Maret 2010, 15:03 WIB.

10. Lihat "Kebobrokan Bea Cukai Berawal dari Ketidaksihonestan," *Sinar Harapan*, Rabu, 29 Juni 2005.

11. Lihat "KPK Temukan Ratusan Juta Rupiah di Kantor BC Priok," *ANTARA News*, 30 Mei 2008 21:18; "Empat Pejabat Bea Cukai Terindikasi Korupsi," *TEMPO Interaktif*, Minggu, 01 Juni 2008. KPK menemukan uang mencapai ratusan juta rupiah di meja-meja pelayanan bea cukai dalam inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pelayanan Utama B'.

12. Lihat Ahmad Erani Yustika, "Ekonomi Biaya Tinggi," *Seputar Indonesia*, Selasa, 03 February 2009; dan "Penyakit Birokrasi Dorong Ekonomi Biaya Tinggi," *Jawa Pos National Network*, Selasa, 13 April 2010.

13. Lihat "Korban Longsor Cianjur Keluhkan Pungutan Liar," *www.metrotvnews.com*, Senin, 11 Januari 2010, 02:13 WIB; "Pungutan Liar pada Jamkesmas," *Kompas*, Rabu, 10 Februari 2010; "Pungutan Liar Masih Berkeliaran di Kelurahan," *www.detiknews.com*, Rabu, 28 April 2010 12:00 WIB; "Kejaksaan Isyaratkan Tersangka Baru Pungutan Liar Pasar," *ANTARA News*, Selasa, 15 Juni 2010, 00:31 WIB; "Tiga Kepala Desa Tersangka Pungli Sertifikat Massal Batal Ditahan," *TEMPO Interaktif*, Kamis, 26 Agustus 2010. | 18:20 WIB; dan "Kejaksaan Periksa Sekretaris Kota Makassar," *TEMPO Interaktif*, Kamis, 24 Juni 2010 | 12:21 WIB.

14. "BPK Masih Temukan Pungutan Liar Rp 186,47 Miliar," *www.detikfinance.com*, Selasa, 01 Juni 2010 14:34 WIB.

15. Lihat Loren Rytter, "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Soeharto's Order," *Indonesia*, No. 66, October 1998, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

16. Lihat "BUMN Sarang Korupsi," *Banjarmasin Post*, Minggu, 21 Agustus 2005.

17. Lihat "Kejagung Umumkan Dugaan Korupsi BUMN," *www.okezone.com*, Kamis, 5 November 2009 - 18:45 wib.

18. Lihat "ICW Temukan Indikasi Korupsi BUMN Rp 10 Triliun," *TEMPO Interaktif*, Kamis, 29 November 2007 | 16:57 WIB.

19. Lihat A Schwarz dan J Paris, (eds), 1999, *Politics of Post-Suharto Indonesia*, New York: Council and Foreign Relations.

20. Lihat Vedi R Hadiz, 2005, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta, LP3ES.

Pemberantas Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Pangabean memperkirakan sekitar 35 dana dalam APBN 2010 berpotensi dikorup khususnya pengadaan barang dan jasa<sup>22</sup> dan dapat memperlemah daya saing.<sup>23</sup>

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, korupsi memang menjadi keprihatinan publik. Untuk itulah kita perlu menelusuri sejumlah rangkaian modus korupsi yang tampaknya makin marak. Telah berulang kali Indonesia dipersepsikan sebagai negeri paling marak dalam praktik korupsi sebagaimana tercermin berdasarkan survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC)<sup>24</sup> seperti diuraikan pada Tabel 1.

Tidak perlu disembunyikan mengenai pandangan orang maupun sejumlah kasus yang menandai maraknya korupsi setelah berlalunya rezim Soeharto. Dengan menelusuri dan mempelajari pola yang berkembang, kita lebih mungkin untuk memberantasnya. Sepanjang reformasi digulirkan praktik korupsi terus berlangsung. *Pertama*, sebagian proses politik dalam pemilihan umum multipartai telah dicurigai mengandung praktik "politik uang" (*money politics*).<sup>25</sup> Sebelum pemilu 2004 digelar, SBY pernah mengingatkan bahwa politik uang sebagai salah satu musuh besar yang akan menghadang dan mengancam pelaksanaan pemilu.<sup>26</sup> Disesalkan "politik uang" terjadi pada hampir semua tahapan, yaitu prakampanye, masa kampanye, minggu tenang dan serangan fajar pada hari pencoblosan. Pemantauan yang dilakukan ICW, Transparency International Indonesia (TII), dan jaringan LSM di delapan kota besar tercatat 114 kasus politik uang pada pemilu legislatif 2004, lebih tinggi dibandingkan Pemilu 1999 yang hanya 62 kasus.<sup>27</sup>

*Kedua*, tidak hanya dalam pemilu nasional, "politik uang" juga terjadi dalam proses pemilu kada untuk calon kepala daerah: gubernur, bupati dan walikota. Biaya pemilu kada untuk 244 daerah mencapai Rp 55 triliun, belum termasuk biaya yang dikeluarkan para calon yang berebut suara pemilih.<sup>28</sup> Dalam pemilihan bupati di Kabupaten Purbalingga, 19 April 2010, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mendapat 20 laporan kasus politik uang.<sup>29</sup> Kasus lainnya dalam pemilihan bupati Sidoarjo.<sup>30</sup> Kasus-kasus ini menimbulkan kerisauan Presiden SBY sebagaimana yang diungkapkannya dalam pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke-65 di Gedung DPR.<sup>31</sup>

*Ketiga*, dengan pemilu yang lebih mengandalkan uang, akan mengarahkan anggota parlemen melakukan korupsi.<sup>32</sup> Tuduhan korupsi di parlemen pun bermunculan<sup>33</sup> terutama sejak tertangkapnya Al Amin Nur Nasution bersama empat orang lainnya, termasuk seorang perempuan dan Sekretaris Daerah Kota Bintan Azirwan, telah ditangkap di Hotel Ritz Carlton Jakarta dengan sangkaan melakukan tindak pidana suap pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada 9 April 2008.<sup>34</sup> Begitu juga, dugaan suap melibatkan 39 anggota DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, dengan imbalan Rp 300 juta- Rp 500 juta per anggota, setelah Agus Condro "bernyanyi" di mana 41 anggota DPR mencairkan cek, total 480 lembar.<sup>35</sup> Belakangan dicurigai bahwa usulan dana aspirasi sebagai modus baru korupsi.<sup>36</sup>

Tentu saja, tak hanya anggota DPR yang tersandung korupsi, tetapi juga sejumlah mantan menteri dari kalangan politisi seperti sangkaan atas

21. Lihat "SBY: 10 Tahun Reformasi Jadi Revolusi Diam-diam," *www.detiknews.com*, Senin, 16 Agustus 2010, 11:39 WIB.

22. Lihat Tumpak: "35 Persen APBN Berpotensi Korupsi," *www.detiknews.com*, Rabu, 02 Desember 2009 10:12 WIB. Sampai November 2009, KPK menerima 2.100 pengaduan dugaan korupsi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Tahun 2010, negara menyiapkan anggaran Rp 327 triliun untuk belanja atas dua bentuk, yaitu belanja modal Rp 76,8 triliun dan belanja barang Rp 99,7 triliun.

23. Zulkieflimansyah, "Daya Saing dan Deindustrialisasi," *www.zulkieflimansyah.com*, Rabu, 25 Februari 2004; "Daya Saing Lemah, Industri Jabar Rontok," *Harian Neraca*, 04 Jan 2010; dan "Hadapi FTA, Daya Saing Indonesia Masih Lemah," *TEMPO Interaktif*, Senin, 17 Mei 2010 | 12:13 WIB.

24. Lihat PERC: "Indonesia Negara Paling Korup!" *www.kompas.com*, Senin, 8 Maret 2010 | 21:20 WIB; dan "Survei Internasional: Indonesia Masih Paling Korup!" *www.theglobal-review.com*, 24 Maret 2010.

25. Lihat International Foundation for Election System (IFES), 1999, *Money Politics: Regulation of Political Finance in Indonesia, Analysis and Recommendation*, Washington DC: IFES.

26. Lihat Oksidella Yanto, "Uang, Pembunuh Demokrasi dalam Pemilu 2004," *Sinar Harapan*, Kamis, 19 Februari 2004.

27. Lihat Teten Masduki, "Politik Uang dan Pemenangan Pemilu," *Kompas*, Jumat, 2 Juli 2004. Lihat juga, "Money Politics Ancaman Terbesar Pemilu," *Jawa Pos*, Rabu, 31 Desember 2008.

28. Lihat Didik J Rachbini, "Politik Uang dan Demokrasi Pasar Loak," *Media Indonesia*, 23 Agustus 2010. Beberapa kasus terjadi dalam pemilu kada di Jawa Timur. Lihat juga, "Praktik Politik Uang dalam Pilkada Lebih Masif dari Pilpres," *hukumonline.com*, 1 Juli 2005.

29. Lihat Dirjen Kesbangpol: "Pemilu Kada Penyebab Korupsi," *www.scientiarum.com*, Kamis, 29 Juli 2010.

30. Lihat Dua puluh Kasus Politik Uang di Purbalingga," *www.kompas.com*, Senin, 19 April 2010 | 20:48 WIB.

31. Lihat "Politik Uang Warnai Hari Pencoblosan," *www.ruangberita.com*, 25 Juli 2010.

32. "SBY: Politik Uang dalam Pemilu kada Sengsarakan Rakyat," *detiknews.com*, Senin, 16 Agustus 2010 11:49 WIB.

33. Lihat "Potensi Korupsi DPR Karena Politik Biaya Tinggi," *ANTARA News*, Kamis, 5 Maret 2009 10:53 WIB.

34. Lihat Febri Diansyah, "Korupsi di Gedung Rakyat," *Seputar Indonesia*, Rabu, 2 Juli 2008; dan Aan Zainal Hafid, "Korupsi DPR dan Nasib Pemilu," *Pikiran Rakyat*, Jumat, 6 Maret 2009.

35. Lihat Hendarji, "Bongkar Korupsi DPR," *Media Indonesia*, Rabu, 23 April 2008.

mantan Menteri Kehakiman/Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Iha Mahendra dalam kasus Sistem Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum). Juga mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, tersangka kasus korupsi pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung; dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang mengalirkan dana nonbujeter sekitar Rp 15 miliar ke sejumlah tokoh politik, partai politik dan tokoh masyarakat.<sup>37</sup>

*Keempat*, negara telah mengalami desentralisasi kekuasaan ke ratusan daerah dan secara resmi pemerintah memberlakukan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sejak Januari 2001. Kemudian UU ini mengalami revisi menjadi UU No. 32/2004.

Desentralisasi pemerintahan ini juga telah menggiringkan kesempatan bagi terjadinya desentralisasi korupsi.<sup>38</sup> Banyak gubernur, bupati, walikota<sup>39</sup> serta anggota DPRD I dan II, dinyatakan tersangka dan terdakwa dalam kasus korupsi.<sup>40</sup> Berbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah terus bertambah.<sup>41</sup>

*Kelima*, desentralisasi atau perkembangan otonomi daerah juga keluar kebijakan pemekaran wilayah. Sejak 1999, telah mekar 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota sehingga total kini menjadi 524 pemerintah daerah. Tetapi dari tahun 2000, pemekaran ini juga menampakkan catatan buruk karena diduga sedikitnya muncul 1.891 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan/penggelembungan

**Tabel 1: Peringkat Negara Terkorup di Asia Pasifik 2009-2010**

No	Negara	2009	2010
1	Indonesia	8,32	9,27
2	Kamboja	7,25	9,10
3	Vietnam	7,11	8,07
4	Filipina	7,0	8,06
5	Thailand	7,63	7,60
6	India	7,21	7,18
7	China	6,16	6,52
8	Malaysia	6,70	6,47
9	Taiwan	6,47	6,28
10	Korea Selatan	4,64	5,98
11	Macau	5,84	4,96
12	Jepang	3,99	3,49
13	Amerika Serikat	2,89	3,42
14	Hong Kong	1,89	2,67
15	Australia	2,4	2,28
16	Singapura	1,07	1,42

Sumber: PERC dalam *Kompas.com*/8/3/2010

35. Lihat Hendarli, "Ledakan Korupsi?" *Kompas*, Selasa, 13 April 2010.

36. Lihat "Dana Aspirasi Lahan Korupsi Baru DPR," *www.jakartapress.com*, Selasa, 08 Juni 2010 | 10:58 WIB.

37. Lihat "Menteri-Menteri Tersandung Korupsi," *www.vivanews.com*, Senin, 5 Juli 2010, 11:27 WIB.

38. Lihat Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah," *TEMPO Interaktif*, Kamis, 04 November 2004 | 18:51 WIB.

39. Lihat "7 Gubernur 3 Wagub 62 Bupati/Walikota Tersangkut Korupsi," *www.matabumi.com*, Selasa, 04 Desember 2007-14:20.

40. Lihat "Ratusan Anggota DPRD Terlibat Korupsi," *Media Indonesia*, Jumat, 7 Maret 2003; "Kasus Dugaan Korupsi DPRD Depok ke Kejati Jabar," *Republika Online*, Kamis, 3 Maret 2005; "Kejagung Bidik Tersangka Baru Korupsi DPRD DKI," *ANTARA News*, Senin, 28 September 2009 21:29 WIB; "Usai Lebaran. Sidang Korupsi DPRD Rp 13,2 M Dimulai," *www.okezone.com*, Rabu, 23 September 2009-01:10 WIB; "Korupsi, 21 Mantan Anggota DPRD Bogor Disidang," *www.okezone.com*, Senin, 28 Desember 2009-09:26 WIB; "Dugaan Korupsi DPRD Sulsel, Wagub Salahkan Sekwan," *www.tribun-timur.com*, Kamis, 29 Juli 2010 | 20:36 WITA; "Korupsi Ratusan Juta 5 Mantan Anggota DPRD Nganjuk Segera Dieksekusi," *www.bela-bangsa.com*, Jumat, 18 Juni 2010 07:38; dan "Korupsi Berjemaah, Mantan Anggota DPRD Mamasa Diancam 10 Tahun Penjara," *www.liputan6.com*, Senin, 08 Feb. 2010.

41. Lihat "Gubernur Sumut Tersangka Korupsi," *ANTARA News*, Selasa, 20 April 2010 14:51 WIB; "Bupati Cianjur Dituding Terlibat Korupsi," *www.metrotvnews.com*, Jumat, 06 Februari 2009 05:13:09; "Mantan Bupati Subang Tersangka Korupsi," *www.okezone.com*, Jumat, 7 Agustus 2009 - 14:21 wib; "Penahanan Bupati Karawang Dadang Akhirnya Ditangguhkan," *Kompas*, Senin, 15 Agustus 2005; "Bupati Aceh Barat Lengkapi Bukti Korupsi ke KPK," *www.serambinews.com*, Jumat, 22 Mei 2009; "Bupati Aceh Singkil, Tersangka Kasus Korupsi," *Gatra*, 3 Maret 2005; "Korupsi APBD Aceh Tenggara: Berkas Korupsi Bupati Dilimpahkan ke Jaksa," *www.vivanews.com*, Sabtu, 11 Juli 2009; "Laporan Korupsi: Dugaan suap Bupati Simeulue," *www.vivanews.com*, Selasa, 7 Oktober 2008, 10:23 WIB; "Seluruh Anggota DPRD dan Bupati Nikmati Dana Korupsi," *TEMPO Interaktif*, Kamis, 01 September 2005 | 22:53 WIB; "Kekayaan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Kalahkan Milik Gubernur Soekarno," *Koran Tempo*, Jumat, 21 Agustus 2009; "Bupati Lumajang Diperiksa Kasus Korupsi," *www.beritakota.net*, 24 Mei 2010; dan Dituduh Korupsi

anggaran dan suap sebagaimana yang tampak dalam Tabel 2. Jumlah korupsi di Provinsi Banten menempati peringkat tertinggi.<sup>42</sup>

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Banten	593
2	Kepulauan Riau	463
3	Maluku Utara	184
4	Bangka dan Belitung	173
5	Sulawesi Barat	168
6	Gorontalo	155
7	Papua Barat	147
<b>Total</b>		<b>1.891</b>

Sumber: Pukat FH UGM.

Presiden SBY merisaukan tingginya dugaan korupsi yang terjadi di wilayah pemekaran. Sebagaimana dicatat, dalam satu dasawarsa pemekaran, telah telah menghasilkan sekitar 205 daerah pemekaran (baru), tapi sekitar 80 persen mengalami kegagalan dalam mendongkrak kesejahteraan penduduk.<sup>43</sup> Pernyataan SBY ini diperkuat oleh penilaian BPK bahwa program pemekaran daerah belum memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan daerah hasil pemekaran dan wilayah sekitarnya.<sup>44</sup> Terkadang terjadi sengketa batas wilayah.<sup>45</sup>

Keenam, desentralisasi kekuasaan negara juga mengalami perkembangan kelembagaan seperti melalui pembentukan beberapa komisi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Hukum Nasional, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK), selain yang telah lebih dulu terbentuk Komnas HAM. Perluasan institusi negara juga terjadi dengan munculnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hanya lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dihapus, tetapi kemudian menjelma Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Desentralisasi kekuasaan pemerintah, Mahkamah Agung (MA) dan DPR/MPR juga tersebar ke lembaga-lembaga baru itu dan dipastikan penyebaran alokasi anggaran. Dalam beberapa lembaga ini juga terganggu oleh dugaan korupsi atau suap.<sup>46</sup>

Ketujuh, dengan terus berlanjut dan maraknya mafia peradilan maka silang sengketa antar lembaga penegak hukum tak terhindarkan. Ketegangan antara Mabes Polri dan Kejaksaan Agung di satu pihak dengan KPK di pihak lain yang mengakibatkan dua orang pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah menjadi tersangka dipicu oleh pendapat tertulis mantan Ketua KPK Antasari Azhar bersumber dari pertemuannya dengan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo di Singapura.<sup>47</sup> Dari kasus ini terkuak jaringan mafia peradilan, khususnya makelar kasus (markus) dan dugaan suap atau pemerasan Rp 5,1 miliar,<sup>48</sup> serta dugaan pelemahan KPK.<sup>49</sup> Lainnya adalah ketegangan antara MA dengan KY<sup>50</sup> serta sebelumnya ketegangan antara MA dengan KPK.<sup>51</sup>

Kesepuluh, sebagai negeri bahari, Indonesia memiliki sumber kekayaan laut. Tetapi sebagian besar justru menjadi salah satu sasaran tindakan yang merugikan negara. Pada 2002, Presiden telah mengeluarkan keputusan No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kegiatan Penambangan dan Ekspor Pasir Laut, tetapi ekspor ilegal ini tetap berlangsung. Saat itu, menurut Ketua Dewan Pengawas Asosiasi

Rp 74 Miliar, Bupati Pasuruan Diadili," *Pos Kota*, Selasa, 3 Agustus 2010 - 12:09 WIB.

42. Lihat juga *Kompas*, Rabu, 15 April 2009.

43. Lihat "Presiden: 80 Persen Pemekaran Daerah Gagal," *TEMPO Interaktif*, Rabu, 14 Juli 2010 | 14:34 WIB; "SBY: 80 Persen Pemekaran Wilayah Gagal," *detiknews.com*, Rabu, 14 Juli 2010 15:15 WIB

44. Lihat "Sebagian Besar Daerah Pemekaran Dianggap Gagal," *TEMPO Interaktif*, Selasa, 13 April 2010 | 13:39 WIB.

45. Lihat "Sengketa Batas Wilayah Akan Jadi 'Bom Waktu'," *erabaru.net*, Rabu, 23 September 2009; dan "Pemekaran Daerah Picu Sengketa Batas Wilayah," *Jawa Pos National Network*, Selasa, 15 Juni 2010, 05:05:00.

46. Lihat "Irawady Joenoes Ditangkap Bersama Orang yang Diduga Penyup," *www.detiknews.com*, Rabu, 26 September 2007 19:43 WIB; dan "Anggota Komisi Yudisial Tertangkap Basah KPK Terima Suap Rp 3,7 M," *Sinar Indonesia Baru*, 27 September 2007.

47. Lihat "Kasus 'Berawal' dari Anggoro," *www.bbc.co.uk*, 08 November, 2009 - Published 11:46 GMT; dan "Buron Anggoro Wijoyo Terdeteksi Berada di Singapura," *www.metronews.com*, Minggu, 12 Juli 2009 20:05 WIB.

48. Lihat "Ada Kaitan Peran Anggoro dan Bereskrim," *www.nonblok.com*, Selasa, 11 Mei 2010 23:40 WIB.

49. Lihat "Dugaan Pelemahan KPK Semakin Kuat," *www.kompas.com*, Kamis, 12 November 2009 | 05:05 WIB; "Ada Indikasi Pelemahan KPK," *www.republika.co.id*, Jumat, 11 Juni 2010, 20:16 WIB; dan "Todung Berberkan Tiga Cara Pelemahan KPK," *www.kompas.com*, Rabu, 1 September 2010 | 15:27 WIB.

50. Lihat "Masih Haram Berpuasa, Bagir Kembali Tolak Panggilan Komisi Yudisial," *TEMPO Interaktif*, Kamis, 12 Januari 2006 | 12:04 WIB; "Komisi Yudisial Tak Bisa Panggil Paksa Bagir Manan," *TEMPO Interaktif*, Senin, 16 Januari 2006 | 03:06 WIB; "Tim Mediasi Jembatani Konflik Komisi Yudisial-Mahkamah Agung," *TEMPO Interaktif*, Selasa, 14 Februari 2006 | 20:13 WIB; "Jimly Tawarkan Solusi Konflik Mahkamah Agung-Komisi Yudisial," *TEMPO Interaktif*, Senin, 27 Februari 2006 | 16:04 WIB; dan "Putusan Hakim Pintu Masuk Pengawasan," *TEMPO Interaktif*, Senin, 05 Maret 2007 | 16:37 WIB.

51. Lihat "Penyidik KPK Geledah MA," *www.detik.com*, Jumat, 30 September 2005 21:09 WIB; "KPK Geledah Ruang Kerja Bagir Manan Cs," *detiknews.com*, Kamis, 27 Oktober 2005 13:55 WIB; "KPK Kembali Geledah MA," *TEMPO Interaktif*, Selasa, 01 November 2005 | 16:53 WIB; dan "KPK Kembali Geledah MA," *www.sijorimandiri.net*, Rabu, 02 November 2005. Kasus ini mencuat atas dugaan suap yang dilakukan pengacara Probosutedjo terhadap hakim di Pengadilan Tinggi

Perusahaan Pertambangan Pasir Laut Riau, Thamrin Nasution, dugaan pencurian pasir laut dilakukan secara terang-terangan dengan pengawalan kapal keruk oleh kapal tentara dan sekali pengawalan ke Singapura per kapal dengan tarif Rp 50 juta. Diperkirakan sebanyak 90% kegiatan ekspor pasir laut di Riau ilegal dan mengakibatkan kerugian negara mencapai Sin \$ 1,765 miliar atau sekitar Rp 9 triliun sejak 1978 hingga 2001.<sup>52</sup> Tetapi dari penambangan dan ekspor ilegal pasir laut ini ada yang memperkirakan kerugian Rp 2,3 triliun per tahun. Sementara, pencurian dan penyelundupan ikan (ekspor ilegal) masih terus merugikan negara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, sejumlah kasus yang terjadi di perairan provinsinya, telah mengakibatkan kerugian mencapai Rp 20 triliun. Jika dihitung dari Laut Arafura, Laut Sulu dan Laut China Selatan mencapai Rp 50 triliun.

### Dampak yang Ditimbulkan Korupsi

Penelusuran praktik korupsi dan kolusi baik yang diwarisi pemerintahan sebelumnya maupun yang berkembang dalam lebih satu dasawarsa reformasi, jelas berdampak serius bagi kondisi ekonomi dan tingkat kehidupan rakyat. *Pertama*, praktik korupsi dan kolusi itu juga menimbulkan pembusukan atas watak aparat penegak hukum dan sistem peradilan<sup>54</sup> sehingga mengabaikan atau menihilkan harapan untuk keadilan.<sup>55</sup> Dugaan praktik dan jaringan mafia peradilan bisa berkembang ibarat teror bagi proses penegakan hukum dan dalam upaya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi.<sup>56</sup>

*Kedua*, proses politik setelah tumbangannya rezim Orde Baru justru menuai hasil-hasil yang

membusukkan karena praktik korupsi yang terus meluas. Kebebasan politik dan format politik baru yang muncul dengan harapan membuahkan "pemerintahan yang baik" (*good governance*) terhambat oleh korupsi. Praktik "politik uang" jelas menodai asas luber dan jujur dalam pemilu nasional dan pemilu kada. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sekitar 1.500 transaksi keuangan daerah dicurigai menyimpang beberapa tahun terakhir. Korupsi ini telah melahirkan watak politisi yang rakus.<sup>57</sup>

*Ketiga*, telah banyak pakar politik dan ekonomi yang mengemukakan pandangan maupun data empiris yang menunjukkan bahwa korupsi menimbulkan "ekonomi biaya tinggi" dan dinilai telah menghambat kemajuan maupun proses mengatasi kesulitan ekonomi.<sup>58</sup> Banyak pungutan yang dilegalkan di daerah tercermin dari keluarnya berbagai peraturan daerah (Perda). Bappenas telah menemukan 3.091 Perda bermasalah yang menghambat investasi<sup>59</sup>

*Keempat*, tak hanya menimbulkan hambatan bagi investasi dan kemajuan ekonomi, tetapi pasti pula dapat menggagalkan tujuan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan, korupsi menggerogoti kemampuan negara dalam membiayai program dalam bidang kesehatan<sup>60</sup>, pendidikan,<sup>61</sup> perluasan lapangan kerja, perumahan dan penanggulangan bencana.<sup>62</sup> Korupsi yang melemahkan kemampuan negara diungkapkan juga oleh Presiden SBY secara terbuka ketika mengemukakan mengenai 80 persen daerah pemekaran yang kurang berhasil atau gagal.<sup>63</sup> Pemekaran wilayah lebih dinikmati elite lokal dan 80% daerah hasil pemekaran gagal mengembangkan diri.

dan MA.

52. Lihat "Negara Rugi Rp 9 Triliun dari Pasir Laut Ilegal," *Koran Tempo*, Kamis, 16 Mei 2002; dan "Ekspor Pasir Laut Ilegal Masih Marak," *Koran Tempo*, Kamis, 20 Juni 2002.
53. Lihat "Kerugian Pencurian Ikan, 20 Triliun," *www.kompas.com*, Kamis, 26 Agustus 2010 | 11:45 WIB; "Pencurian Ikan di Laut Arafura Rugikan Negara Rp15 Triliun Per Tahun," *ANTARA News*, Kamis, 3 Juli 2008 19:36 WIB; dan "Akibat Pencurian Ikan, Indonesia Rugi 2,136 juta Dollar," *TEMPO Interaktif*, Rabu, 19 Februari 2003 | 17:40 WIB.
54. Lihat Hendardi, "Mafia Peradilan di Indonesia," *Kompas*, Kamis, 2 Februari 2006; "Mafia Peradilan Berjalan Sistemik," *TEMPO Interaktif*, Kamis, 06 Oktober 2005 | 21:18 WIB; "Mafia Peradilan Merusak Mahkamah Agung," *ANTARA News*, Kamis, 23 Juli 2009 19:53 WIB;
55. Lihat "Mafia Peradilan Telantarkan Keadilan," *kompas.com*, Selasa, 4 Agustus 2009 | 10:30 WIB
56. Denny Indrayana, "Teror Mafia Peradilan," *Tempo*, 10-16 Oktober 2005.
57. Lihat Hendardi, "Korupsi Membusukkan Reformasi," *Kompas*, Senin, 21 Juni 2010. Lihat juga, "Penyimpangan keuangan di Pemrov DKI capai Rp974 miliar," *Waspada Online*, Selasa, 04 Agustus 2009 07:57; "BPK Temukan Penyimpangan Keuangan Negara Rp 349 Miliar di Sulut," *www.pro3rri.com*, Jumat, 16 April 2010 18:08; dan "BPK Temukan Berbagai Penyimpangan Keuangan Negara Di Provinsi NTT," *Timor Express*, Rabu, 16 Juni 2010.
58. Lihat "Pelaku Usaha Jatim Keluhkan Ekonomi Biaya Tinggi," *kabarbisnis.com*, Senin, 03 Mei 2010 | 11:44 wib; dan "Manufaktur Tak Berkembang, Ekonomi Biaya Tinggi Jadi Salah Satu Penyebab," *Kompas*, Senin, 8 Feb. 2010.
59. Lihat "Perda-perda Penghambat Investasi," *www.surabayapost.co.id*, Selasa, 27 Juli 2010 | 10:54 WIB; dan "13 Perda Hambat Pertumbuhan Investasi Sulsel," *www.kapanlagi.com*, Senin, 08 Januari 2007 18:21.
60. Lihat "Distributor Alat Kesehatan Tersangka Korupsi Diperiksa Kejati," *ANTARA News*, Kamis, 13 Mei 2010 05:42 WIB; "Korupsi alat kesehatan, mantan Menkes dihukum," *www.bisnis.com*, Jumat, 23 April 2010 18:45:08 WIB; dan "Korupsi Kesehatan Indonesia Rp 128 Miliar," *www.kompas.com*, Jumat, 21 November 2008 | 20:06 WIB.
61. Lihat "Korupsi BOS Diduga Terjadi di Beberapa Sekolah," *www.republika.co.id*, Kamis, 11 Feb 2010; "Koalisi Akan Laporkan Dugaan Korupsi dana BOS dan BOP ke

<sup>64</sup> Suatu daerah terus didera kemiskinan yang lebih parah seiring meningkatnya korupsi seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<sup>65</sup>

*Keima*, pada gilirannya, cepat atau lambat sesuai dengan tingkat dan kedalamannya, korupsi dapat menggiring suatu negara ke dalam krisis yang gawat. Pengalaman yang terjadi selama 32 tahun Orde Baru, terjadi sekali krisis fiskal ketika harga migas merosot di pasar dunia pada awal 1980-an. Tetapi gelombang besar krisis baru terjadi pada paruh kedua 1997 di mana utang luar negeri membubung dan kredit macet dalam bentuk BLBI semakin memperparah kondisi keuangan, serta sebagian rakyat kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok (sembako) karena harganya yang melambung dan ketersediaan berkurang akibat penimbunan oleh spekulasi.

### Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi di Indonesia berkembang dengan pesat karena disebabkan oleh beberapa hal antara lain: *pertama*, lemahnya fungsi aparat penegakan hukum dalam menegakkan kasus-kasus korupsi. *Kedua*, lemahnya fungsi lembaga pengawasan internal dari instansi pemerintahan. *Ketiga*, lemahnya peran aparat legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan. *Keempat*, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, aparat penegakan hukum dan legislatif. *Kelima*, faktor lemahnya perumusan sanksi pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Salah satu kelemahan mendasar yakni perumusan sanksi pidana yang bersifat minimum khusus tidak sebanding dengan sanksi pidana maksimum. Misalnya sanksi minimum dalam Pasal 3 adalah 1 tahun penjara dan denda minimal 50.000.000 sedangkan ancaman maksimumnya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 1.000.000.000. Adalah tidak logis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila pidana maksimumnya berupa seumur hidup dan pidana minimumnya adalah 1 tahun penjara

sebagaimana diatur dalam UU Korupsi.

### Langkah-langkah Strategis Pemberantasan Korupsi

Dengan realitas yang tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa betapa sulitnya upaya membenahi dan mengatasi situasi politik, bisnis, birokrasi dan institusi hukum dari berbagai praktik dan tindak korupsi. Untuk kebutuhan inilah maka perlu ada upaya untuk membebaskan bangsa dan negara RI agar keluar dari pandangan dan sikap yang menenggelamkan kesadaran subjektif dan kreativitas dalam memperbaikinya. Dengan kata lain perlu ada upaya yang serius untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

*Pertama*, sangat penting untuk mengerahkan energi yang signifikan dalam menggerakkan perbaikan politik agar terbentuk situasi kondusif bagi pemberantasan korupsi. Partisipasi rakyat dan penguatan orientasi politik antikorupsi adalah prasyarat dalam menciptakan situasi yang kondusif tersebut. Berbagai organisasi baik partai politik maupun perkumpulan antikorupsi, dapat menjadi arena partisipasi rakyat dan penguatan orientasi yang diperlukan.

*Kedua*, arena partisipasi rakyat itu perlu dibawa untuk menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik antikorupsi. Pembentukan suatu kepemimpinan politik dan moral yang gigih mengawal terhadap penanaman orientasi politik antikorupsi sangat penting sebagai upaya memantapkan kondisi yang bisa mengurangi praktik dan aksi korupsi termasuk mendukung langkah pemerintah dan institusi lainnya yang sejalan dengan itu. Dengan energi politik inilah diharapkan muncul gelombang politik dalam memberantas korupsi.

*Ketiga*, diperlukan partai politik yang berkomitmen dan tekad dalam pemberantasan korupsi dengan melancarkan kampanye serta memberlakukan sanksi bagi mereka yang terlibat korupsi. Tanpa komitmen yang lebih kokoh dan diiringi dengan pemberlakuan sanksi politik maka segala wacana hanya akan sia-sia serta tetap melanggengkan praktik dan tindak korupsi. Artinya,

Dewan," *TEMPO Interaktif*, Minggu, 11 April 2010. | 14:18 WIB.

62. Lihat "Kasus Korupsi Bencana Alam Talaud ke Penuntutan," *ANTARA News*, Kamis, 10 Juni 2010 00:18 WIB; "KPK Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bencana Tsunami," *www.jurnalnet.com*, Senin, 03 September 2007 - 19:41 WIB; "Rekanan Bantuan Tsunami Divonis 7 Tahun," *www.matanews.com*, Selasa, 24 November 2009 at 05:15; dan "Kejati Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Rumah Bantuan di Simeulue," *www.analisadaily.com*, Kamis, 17 Desember 2009.

63. Lihat "Dari 205 Pemekaran Wilayah, 80% Dinilai Gagal," *www.okezone.com*, Rabu, 14 Juli 2010 - 16:00 wib.

64. Lihat "80% Pemekaran Wilayah Gagal," *Lampung Post*, Jumat, 06 Februari 2009.

jika hendak membenahi keadaan selalu dibutuhkan perubahan pandangan dan sikap yang menjadi dimensi subyektif dalam memberantas atau mengurangi perilaku dan perbuatan korup. Pemerintah pun dapat mengambil keputusan yang lebih tepat agar tak berkompromi terhadap praktik dan tindak korupsi.

*Keempat*, perubahan dimensi subjektif harus berlanjut dengan langkah meningkatkan prestasi reformasi hukum. Kejahatan korupsi harus diancam dengan sanksi pidana yang berat yakni berupa perumusan sanksi pidana secara kumulatif absolut (*cummulatie absolut*) antara pidana penjara dan pidana denda serta perampasan aset terpidana yang diperoleh dari kejahatan. Perlu diatur agar perumusan ancaman sanksi pidana minimum khusus sepadan dengan ancaman pidana maksimum. Misalnya jikalau ancaman pidana maksimumnya berupa pidana penjara seumur hidup maka seyogianya pidana minimumnya adalah 15 tahun penjara.

Selain itu, asas pembuktian terbalik semakin menjadi kebutuhan yang signifikan dalam memerangi atau memberantas tindak pidana korupsi.<sup>65</sup> Asas ini menuntut penerapan disiplin bagi setiap orang dalam melaporkan kekayaan pribadi dan badan hukum.<sup>67</sup> Meskipun begitu, UU yang diperbarui haruslah dapat mencegah praktik dan tindak pemerasan aparat dalam menerapkan asas tersebut.<sup>68</sup> Begitu juga perlu penerapan prinsip tanpa diskriminasi atau tebang pilih sehingga tak menimbulkan pembebasan dari proses hukum (*impunity*).

*Kelima*, dengan UU yang lebih kuat, juga akan berdampak lebih positif terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan dan KPK mempunyai kewenangan yang tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membongkar tindak pidana korupsi. Relasi ketiga institusi ini perlu juga dipersatukan (bukan persaingan untuk saling menjatuhkan) dalam suatu kerjasama berupa penyidikan dan tuntutan yang lebih kuat atas suatu tindak pidana korupsi.

*Keenam*, bentuk-bentuk pengawasan harus lebih ditingkatkan. Perilaku penegak hukum, hakim, pegawai negara terutama pegawai pajak dan keuangan, juga yang bertugas dalam melakukan

pungutan atau penagihan. Begitu juga dengan memperketat pengawasan terhadap dana transfer ke daerah.<sup>69</sup> Bentuk pengawasan ini dapat pula melibatkan unsur masyarakat, khususnya yang mereka yang aktif dalam memonitor dan menyuarakan kampanye antikorupsi.

*Ketujuh*, peningkatan pelayanan publik dan transparansi maupun kebijakan pemerintah yang antikorupsi adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam mengurangi berbagai bentuk penyelewengan terutama terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran. Spirit pemerintah yang tak puas dalam penanganan kasus korupsi dapat memotivasi bagi peningkatan prestasi dalam memberantasnya.

### Simpulan

1. Praktik korupsi dan kolusi di Indonesia merupakan warisan pemerintahan orde baru dan berkembang dalam lebih satu dasawarsa dalam pemerintahan orde reformasi.
2. Korupsi jelas berdampak serius bagi kondisi ekonomi dan tingkat kehidupan rakyat.
3. Korupsi di Indonesia berkembang dengan pesat karena disebabkan oleh: (1) lemahnya fungsi aparat penegakan hukum; (2) lemahnya fungsi lembaga pengawasan internal dari instansi pemerintahan; (3) lemahnya peran aparat legislatif dalam melakukan pengawasan atas kinerja pemerintahan; (4) lemahnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.
4. Langkah-langkah strategis menanggulangi korupsi yakni: (1) harus ada gerakan bersama dari masyarakat (*social movement*) untuk memberantas korupsi; (2) menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik antikorupsi; (3) diperlukan partai politik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi; (4) mengadakan reformasi terhadap UU antikorupsi agar sanksi pidana dapat mencegah orang melakukan tindak pidana korupsi; (5) kerjasama antara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan atas suatu tindak pidana korupsi; (6) peningkatan pengawasan masyarakat terhadap aparat negara; (7) peningkatan pelayanan publik dan

65. Lihat "NTT Daerah Miskin Tapi Korupsi Tinggi," [www.primaironline.com](http://www.primaironline.com), 09 Mei 2010 | 19:18.

66. Lihat "Presiden: Hati-hati Terapkan Pembuktian Terbalik," [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Selasa, 6 April 2010 | 20:29 WIB.

67. Lihat "KPP: Laporan Kekayaan sebagai Pembuktian Terbalik," [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Senin, 5 April 2010 | 17:07 WIB.

68. Lihat "UU Pembuktian Terbalik Bisa Jadi Alat Pemerasan," [www.okezone.com](http://www.okezone.com), Kamis, 8 April 2010 - 15:26 wib.

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

#### Daftar Pustaka

- Crouch, Harold, 1988, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Hadiz, Vedi R., 2005, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi-Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES.
- Hwan Shin, Yoon, *Demistifying the Capital State: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist Formation in Soeharto's Indonesia*, Thesis Ph.D di Yale University.
- International Foundation for Election System (IFES), 1999, *Money Politics: Regulation of Political Finance in Indonesia, Analysis and Recommendation*, Washington DC: IFES.
- Jenkins, David, 1984, *Soeharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Obor.
- Radjab, Suryadi A, 1999, *Praktik Bisnis Culas Gaya Orde Baru*, Jakarta: Grasindo.
- Richard, Robison, 1986, *The Rise of Capital*, Sidney: Allen & Unwin.
- Ryter, Loren, "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Soeharto's Order," *Indonesia*, No. 66, October 1998, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- Schwarz, A dan J Paris, (eds), 1999, *Politics of Post-Suharto Indonesia*, New York: Council and Foreign Relations.
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: CitraAditya Bakti.
- ....., 2009, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press,